



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BIMBINGAN TEKNIS

HUKUM ACARA PENYELESAIAN
PERKARA PERSILISIHAN
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI &
WALIKOTA

KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU K
abupaten/Kota

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

- 1** Menguji Undang-Undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2** Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 3** Memutus pembubaran partai politik, dan

- 4** Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- 5** Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (impeachment)

Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

1. Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di MK rencananya mulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan September 2018;
2. Dilaksanakan pada hari kerja dan batas penanganan perkara paling lama 45 hari sejak di registrasi oleh MK.

KPU

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Secara Serentak Bagi Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota

- 1** KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, KPU Kota dapat melihat informasi perkara laman di www.mkri.id;
- 2** KPU Provinsi, KPU Kabupaten, KPU Kota dapat memberikan jawaban termohon ke MK setelah persidangan pertama dan mendapatkan rekomendasi dari KPU Pusat (Koordinator KPU Provinsi, KPU, KPU Kota);
- 3** MK memanggil KPU Provinsi, KPU Kabupaten, KPU Kota melalui KPU Pusat;
- 4** MK menyediakan ruangan untuk KPU Pusat;
- 5** Jawaban KPU paling lambat diterima MK dua hari setelah sidang pertama (pendahuluan);

KPU

- 6 Penerimaan Keterangan KPU ada dua cara:
1. Offline (Mengajukan Jawaban Termohon kepada Petugas Penerima di Mahkamah Konstitusi);
 2. Online (Mengajukan Jawaban menggunakan aplikasi SIMPEL melalui KPU Pusat).
-

7 KPU Pusat mendapatkan username dan password untuk login ke Aplikasi SIMPEL di <http://simpl.mkri.id>;

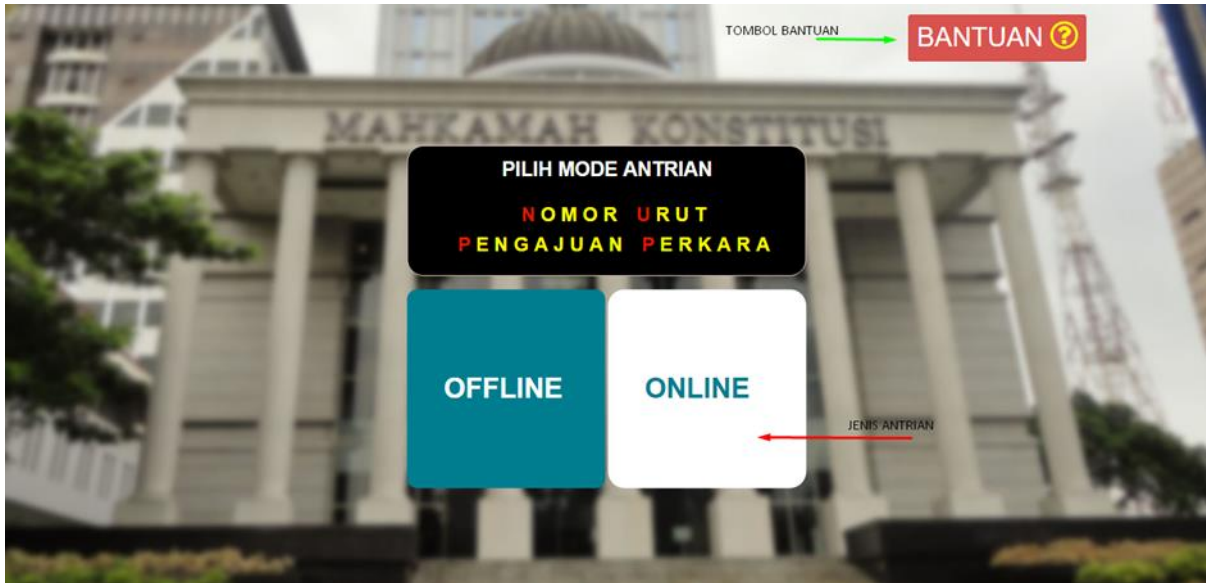
8 KPU dapat melakukan tracking perkara dari SIMPEL;

9 MK menyediakan *Video conference* (VICON) di 42 Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia untuk persidangan jarak jauh.

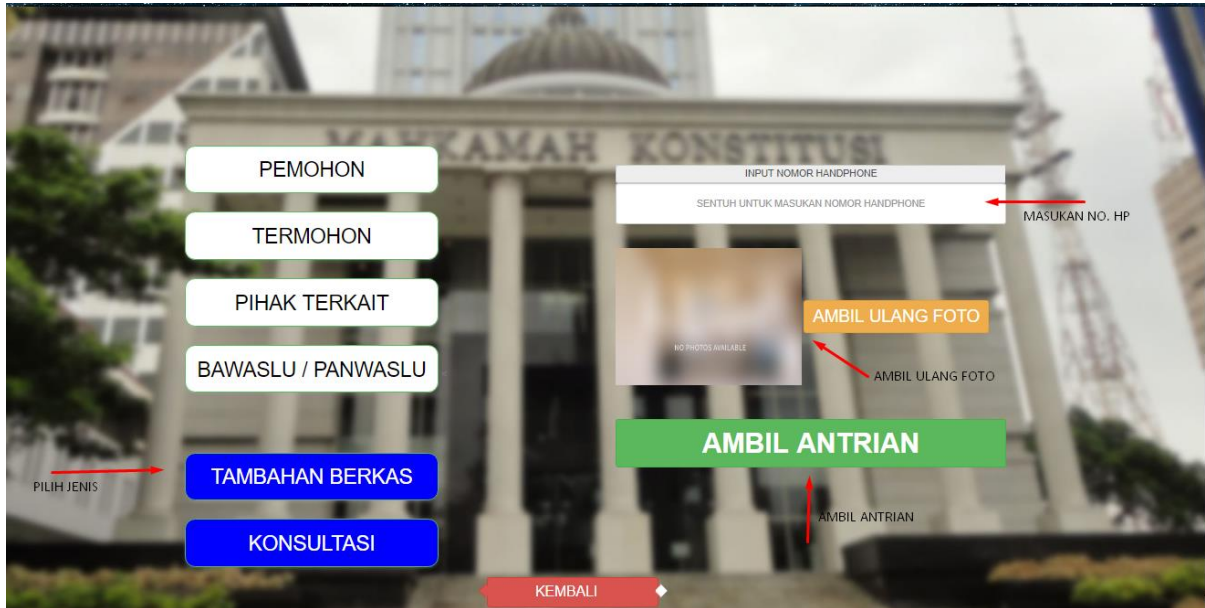
Nomor Urut Pengajuan (NUP)

“Mesin antrian yang sediakan untuk melayani Para pihak berperkara di MK . Bagi Para pihak yang mengajukan secara offline, online atau konsultasi akan disediakan meja layanan khusus.”

MENU UTAMA MESIN ANTRIAN



MENU PARA PIHAK



KERTAS NUP

MAHKAMAH KONSTITUSI RI
NUP

BW 20

Tgl: .../.../2018

Jam: 00:00:00



INFORMASI ANTRIAN

MAHKAMAH



KONSTITUSI

Meja Layanan 1

Meja Layanan 2

Meja Layanan 3

Meja Layanan 4

NUPP

NUPP

NUPP

NUPP

Meja Layanan 5

Meja Layanan 6

Meja Layanan 7

Meja Layanan 8

Tambah Berkas


Tambah Berkas

Tambah Berkas

Tambah Berkas

INFORMASI PELAYANAN ANTRIAN

LOG OUT



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MEJA LAYANAN 8
ONLINE

PEMOHON 0 TERMOHON 0 PIHAK TERKAIT 0 BAWASLU/PANWASLU 0 TAMBAH BERKAS 0 KONSULTASI 0

PANGGIL ANTRIAN

Dilayani

NUPP	Tgl. NUPP	No. HP	Status	Detail	Aksi
2	2018-03-27 12:52:08	748475785	Pemohon	IDENTITAS	LAYANI LEWATI


Dilewati

NUPP	Status	Tgl. NUPP	Keterangan	Aksi
⚠ Tidak ada data				

Daftar Antrian

INFORMASI PELAYANAN ANTRIAN

LOG OUT



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MEJA LAYANAN 1
OFFLINE

PEMOHON 0 TERMOHON 0 PIHAK TERKAIT 0 BAWASLU/PANWASLU 0 TAMBAH BERKAS 0 KONSULTASI 0

PANGGIL ANTRIAN

Dilayani

NUPP	Tgl. NUPP	No. HP	Status	Detail	Waktu Di Panggil	Aksi
4	2018-03-27 13:01:35	0812123456	Pemohon	2018-03-27 13:01:35	IDENTITAS	SELESAI


Dilewati

NUPP	Status	Tgl. NUPP	Keterangan	Aksi
⚠ Tidak ada data				

Daftar Antrian

INFORMASI PELAYANAN ANTRIAN

LOG OUT


MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MEJA LAYANAN 8
ONLINE

PEMOHON 0 TERMOHON 0 PIHAK TERKAIT 0 BAWASLU/PANWASLU 0 TAMBAH BERKAS 0 KONSULTASI 0

PANGGIL ANTRIAN

Dilayani

NUPP	Tgl. NUPP	No. HP	Status	Detail	Aksi
⚠ Tidak ada data					

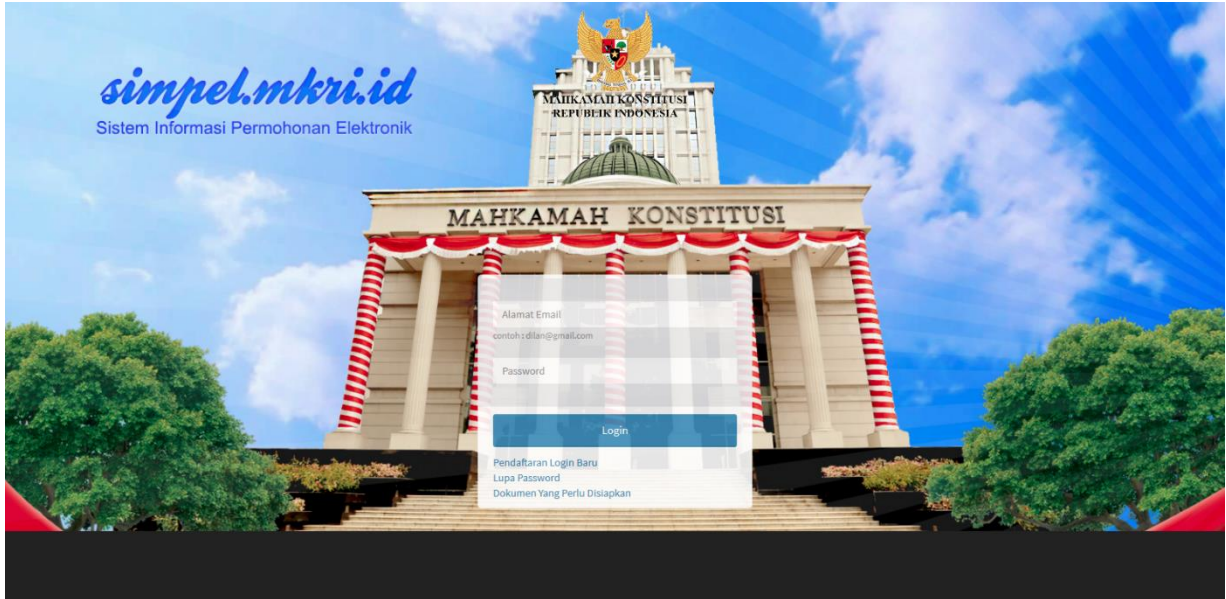
Dilewati

NUPP	Status	Tgl. NUPP	Keterangan	Aksi
2	Pemohon	2018-03-27 12:52:08	Pada saat dipanggil pemohon tidak ada	PANGGIL

Daftar Antrian

No.	NUPP	Jenis	No. HP
⚠ Tidak ada data			

LOGIN KPU KE APLIKASI SIMPEL



HALAMAN DASHBOARD

Dashboard SIMPEL.MKRI.ID

Jawaban Termohon

#	Permohonan	PERMOHONAN	JAWABAN TERMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT	KETERANGAN BAWASLU	TRACKING
1	Jawaban termohon terhadap perkara nomor 1/PHP.GUB-VI/2018	Klik Disini (online)	Klik Disini (online)	Klik Disini (online)	Klik Disini (online)	Klik Disini

- Halaman dashboard berisikan tentang informasi Perkara PHP KADA Jawaban Termohon, Keterangan PT dan Keterangan Bawaslu.
- Daftar perkara akan tampil apabila tanda terima registrasi sudah diberikan ke Petugas Pengadministrasi dan Registrasi Perkara di MK.

HALAMAN DAFTAR PERMOHONAN

SIMPEL.MKRI.ID

bawastu@email.com

Permohonan Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Dashboard > Pilkada 2018 > List Permohonan

List Permohonan

#	Permohonan	Permohonan	Jawaban Termohon	Keterangan Pihak Terkait	Keterangan Bawastu
1	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2018	Klik Disini	-	-	-

Tekan “Klik Disini” maka permohonan akan tampil

PERMOHONAN PILKADA


HALAMAN DAFTAR PERMOHONAN TELAH DI REGISTRASI


The screenshot displays the SIMPEL.MKRI.ID web application interface. The top navigation bar includes the logo, the text 'SIMPEL.MKRI.ID', a menu icon, and the user email 'kpu@email.com'. The main header area shows 'Jawaban Termohon' and 'Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah'. A breadcrumb trail indicates the current page: 'Dashboard > Pilkada 2018 > Permohonan Telah Di Registrasi'. A sidebar on the left contains navigation options: 'Dashboard', 'Pilkada 2018' (with a dropdown arrow), 'List Permohonan', 'Permohonan Registrasi', and 'Informasi Perkara'. The main content area features a blue header 'Permohonan Telah Di Registrasi' and a table with the following data:

#	No Registrasi	Permohonan	Pemohon	Aksi
1	1/PHP.GUB-XV/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2018	Zakaria Saman dan Ir. H.T. Alaidinsyah, M.Eng.	Tanda Terima Jawaban Termohon
2	2/PHP.KOT-XV/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2018	H. Riza Falepi, ST., MT. dan H. Erwin Yunaz, S.E.	Daftar Termohon

Tekan "Daftar Termohon" maka permohonan akan tampil

HALAMAN DAFTAR ONLINE JAWABAN TERMOHON

SIMPEL.MKRI.ID 

kpu@email.com  Online

Dashboard

Pilkada 2018

- List Permohonan
- Permohonan Registrasi

Informasi Perkara

Jawaban Termohon Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum


Dashboard > Permohonan Online > PHPU


Permohonan Online

Jawaban Termohon

Nomor Perkara	<input type="text" value="2/PHP.KOT-XV/2018"/>
Nama Termohon	<input type="text" value="KPU Payakumbuh"/>
Email Termohon	<input type="text"/>
Pokok Jawaban	<input type="text" value="Jawaban termohon terhadap perkara nomor 2/PHP.KOT-XV/2018"/>
Kuasa Termohon	<input type="text"/>
Email Kuasa Termohon	<input type="text"/>
Tanggal Surat Kuasa	<input type="text"/>
Upload Surat Kuasa	<input type="text" value="Browse... No file selected."/>
Upload Jawaban Termohon	<input type="text" value="Browse... No file selected."/>
Upload SK KPU	<input type="text" value="Browse... No file selected."/>
Upload Daftar Alat Bukti	<input type="text" value="Browse... No file selected."/>

HALAMAN TANDA TERIMA JAWABAN TERMOHON


 SIMPEL MKRI ID ☰ kpu@email.com

 kpu@email.com
Online

Dashboard
Pilkada 2018
Informasi Perkara


Tanda Terima Permohonan Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dashboard Pilkada 2018 Tanda Terima Online Termohon

Permohonan Online

 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23528000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

CETAK

TANDA TERIMA JAWABAN TERMOHON ONLINE
Nomor Online : 1/PPAN/ONLINE/17/2018



Nomor Perkara : 1/PHP.GUB-XV/2018
Nama Termohon : KPU Provinsi Aceh
Pokok Jawaban : Jawaban termohon terhadap perkara nomor 1/PHP.GUB-XV/2018
Kuasa Termohon : rudi kurniawan
Tanggal : 03 April 2018 Pukul : 12:28 WIB

NO.	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1.	SURAT KUASA	ADA
2.	JAWABAN TERMOHON	ADA
3.	SK KPU	ADA
4.	DAFTAR ALAT BUKTI	ADA

Panitera Termohon
TTD
Kasianur Sidauruk

Catatan :

- Tanda terima jawaban termohon online ini bukan sebagai bukti bahwa termohon telah diregistrasi.
- Termohon atau kuasa segera melengkapi jawaban termohon online ini dengan membawa dokumen - dokumen yang di butuhkan ke Mahkamah Konstitusi.

HALAMAN INFORMASI PERKARA

The screenshot shows the SIMPEL.MKR.I.D. web application interface. The top navigation bar includes the logo, the text 'SIMPEL.MKR.I.D.', and a user profile 'kpu@email.com'. The left sidebar contains navigation options: 'Dashboard', 'Pilkada 2018', and 'Informasi Perkara'. The main content area is titled 'Informasi Perkara Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah' and features a sub-header 'Jawaban Termohon'. Below this is a table with the following structure:

#	Permohonan	PERMOHONAN	JAWABAN TERMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT	KETERANGAN BAWASLU	TRACKING
1	Jawaban termohon terhadap perkara nomor 1/PHP.GUB-XV/2018	Klik Disini (online)	Klik Disini (online)	Klik Disini (online)	Klik Disini (online)	Klik Disini

- Halaman Informasi Perkara berisikan tentang informasi Perkara PHP KADA Jawaban Termohon, Keterangan PT dan Keterangan Bawaslu.
- Daftar perkara akan tampil apabila tanda terima registrasi sudah diberikan ke Petugas Pengadministrasi dan Registrasi Perkara di MK.

TRACKING PERKARA

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PUTUSAN

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

PUBLIKASI

93/PUU-XV/2017



PUTUSAN

RISALAH

IKHTISAR

PERKARA

Selasa, 20 Maret 2018 | 15:40 WIB

Nomor Perkara : 93/PUU-XV/2017

Amar Putusan : Mengabulkan Permohonan Para ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Selasa, 20 Maret 2018 | 15:10 WIB

Nomor Perkara : 92/PUU-XV/2017

Amar Putusan : Menolak Permohonan Para ...

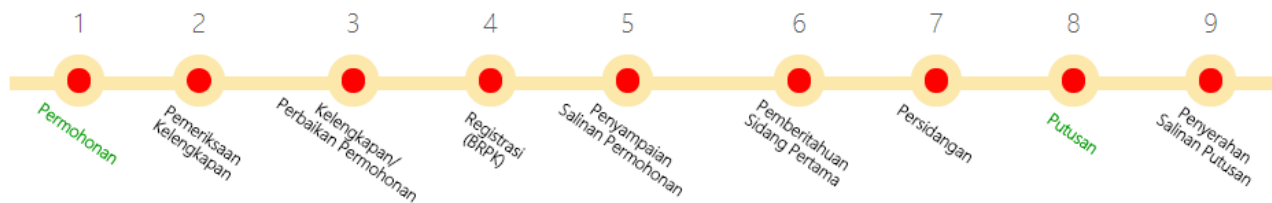
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar

Selengkapnya



Trac

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



PROSES		
NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
1	01-11-2017	Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APPP
2		Penerbitan APBL / APL
3	11-12-2017	Penyerahan Perbaikan Permohonan

PROSES		
NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
1	01-11-2017	Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APPP
2		Penerbitan APBL / APL
3	11-12-2017	Penyerahan Perbaikan Permohonan
4	14-11-2017	Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 93/PUU-XV/2017, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor
5		Penyampaian Salinan Permohonan
6		Telah di terbitkan surat panggilan sidang pertama dengan nomor
7	2017-11-27 14:00:00 WB	"Pemeriksaan Pendahuluan (I)"
	2017-12-11 13:30:00 WB	"Perbaikan Permohonan (II)"
	2018-01-09 11:00:00 WB	"Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait [Mahkamah Agung] (III)"
	2018-01-16 11:00:00 WB	"Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)"
8	2018-03-20 14:00:00 WB	"Pengucapan Putusan"
9		Penyampaian Salinan Putusan

BERKAS			
NO	YANG DISERAHKAN	BANYAK	KETERANGAN
1	Permohonan bertgl 30 Okt 2017	12 rangkap	tanda tangan lengkap.
2	Surat Kuasa Khusus bertgl 28 Okt 2017	12 rangkap	tanda tangan lengkap
3	Daftar Bukti P-1 sd P-5	12 rangkap	
4	Bukti Fisik P-1 sd P-5	12 rangkap	
5	SOftcopy berisi permohonan dan daftar bukti	2 files	
6	Perbaikan Permohonan	12 rangkap	Perkara Nomor 93/PUU-XV/2017
	Daftar Bukti P-3C sd P-3H, P-6	12	



EFENDY & PARTNERS LAW OFFICE

Advokat & Konsultan Hukum

Lingkungan Babakan Huriy RT/RW 003/013 Kota Kaler, Sumedang Utara, Sumedang, Telp.: 081312239572

Sumedang, 11 Desember 2017

Kepada Yth.,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat



Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Perkenankan yang bertanda-tangan dibawah ini: Eep Ependi, S.H., Advokat pada Efendy & Partners Law Office, yang beralamat di Lingkungan Babakan Huriy, Rt.003, Rw.013, Kota Kaler, Sumedang Utara, Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017 bertindak untuk kepentingan dan atas nama:

1. Nama : Abda Khair Mufti
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Pekerja IT, Prysmian Cable Indonesia
Alamat Tinggal : Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9 Rt.014 Rw.007
Kel. Balongandu, Kec. Jatisari, Kab. Karawang



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 93/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Abda Khair Mufti**
Pekerjaan : Pegawai PT Prysmian Cable Indonesia
Alamat : Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9, RT. 014/RW. 007,
Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten
Karawang

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Muhammad Hafidz**
Pekerjaan : Pegawai PT Radiance
Alamat : Jalan Tatyia Wuni IV, Blok F5, Nomor 2, RT. 007/RW.
012, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Bogor

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Abdul Hakim**
Pekerjaan : Pegawai PT Internusa Food
Alamat : Kampung Cilayang, RT. 001/RW. 02, Kelurahan
Cilayang, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak

Sebagai ----- **Pemohon III;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Oktober 2017 memberi kuasa kepada Eep Ependi, S.H., Advokat pada Efendy & Partners Law Office, yang

TRACKING PERKARA

PRESS RELEASE

ANOTASI

PENGUMUMAN

Pengumuman Penelitian Kompetitif Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi Hukum se-Indonesia Tahun

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2018 Maret

Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
26	27	28	1	2	3	4
5 ³	6 ⁴	7 ²	8 ³	9	10	11
12 ¹	13 ¹	14 ²	15	16	17	18
19 ³	20 ⁷	21 ⁵	22 ²	23	24	25
26 ²	27	28 ⁷	29 ³	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

■ Sidang
 ■ Putusan
 ■ Keduanya
 H Libur

BERITA

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Senin, 26 Maret 2018 | 13:47 WIB

MK Indonesia Jalin Kerja Sama dengan MA Monaco
 Dalam Upaya Menjalin Hubungan Kerja Sama Antara Mahkamah Konstitusi RI (Mkri) Dengan Mahkamah Agung

Jumat, 23 Maret 2018 | 08:48 WIB

Ahli: Penahanan dalam KUHAP Tidak Langgar Asas Praduga Tak Bersalah

Ketentuan Penahanan Sebagaimana Tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

[+ Berita Sidang](#) [+ Berita Non Sidang](#)

PENGUJIAN
UNDANG UNDANG

PILKADA
SERENTAK 2018



Simpel.mkri.id



Hakim Konstitusi



Pusat Sejarah
Konstitusi



Debat Konstitusi
2018



Streaming dan
Video Conference



AACC



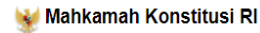
LPSE MKRI



Perpustakaan

INFORMASI PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

Info Penanganan Pilkada Serentak 2017



[Info Pilkada Serentak 2018](#)

Tracking Perkara :

Nomor APPP



Kembali

26 Maret 2018 15:49:2

Selamat datang,

Silahkan pilih menu
yang tersedia
di samping

[Peraturan Terkait Pilkada Serentak](#)

Peraturan-peraturan terkait pilkada serentak

[Info Pengajuan Permohonan Perkara Pilkada Serentak](#)

Info Pengajuan Permohonan Perkara Pilkada Serentak Gubernur, Bupati, Walikota yang diterima Mahkamah Konstitusi

[Info Pilkada Serentak](#)

Informasi wilayah, jumlah penduduk dan pasangan calon pilkada serentak

[Form dan Akta Penanganan Perkara](#)

Formulir dan Akta yang digunakan dalam pilkada serentak

[Info Alur Perkara Pilkada Serentak](#)

Informasi tentang alur perkara terkait pilkada serentak

[Tahapan Penanganan Perkara Pilkada Serentak](#)

Tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara pilkada

[Jadwal Sidang](#)

Jadwal sidang perkara pilkada

[Live Streaming](#)

Live streaming sidang

PERSIDANGAN JARAK JAUH MELALUI *VIDEO CONFERENCE* (VICON)

Apakah persidangan Jarak Jauh itu ?

- Yaitu persidangan tanpa harus hadir di MK. Cukup dengan menggunakan teknologi Vicon

Apa itu Vicon ?

- Seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan para pihak yang berperkara di MK melaksanakan persidangan dari lokasi berbeda sehingga dapat berinteraksi/berkomunikasi melalui pengiriman dua arah gambar video dan suara secara bersamaan.

- Persidangan jarak jauh sah dan diakui oleh MK sesuai Peraturan MK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)
- Penggunaan Vicon dalam persidangan jarak jauh tidak dipungut biaya sama sekali.
- Siapapun para pihak yang masih berperkara di MK dapat menggunakan vicon dalam persidangan jarak jauh di MK.

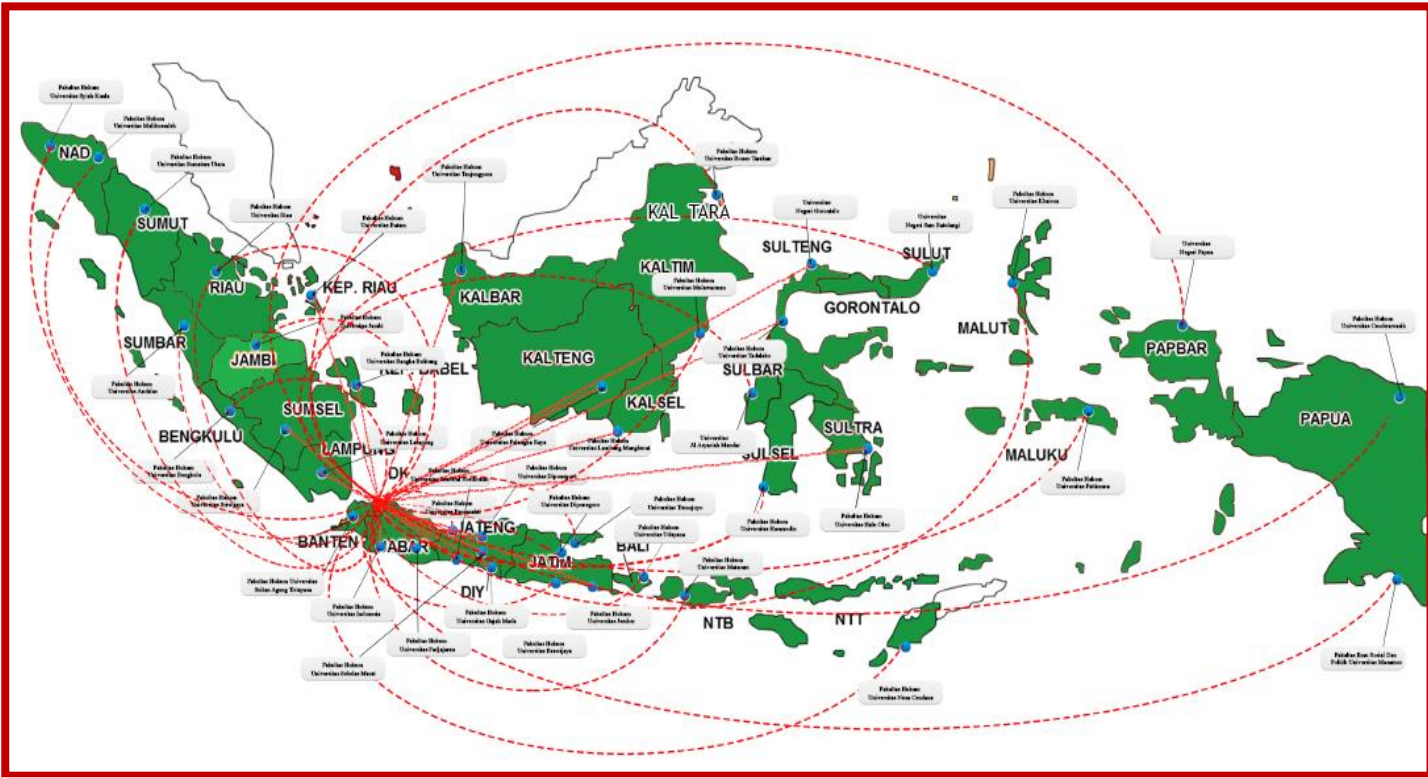
Manfaat Vicon bagi para pihak yang berperkara di MK

- Mendapatkan layanan persidangan yang lebih ccepat melalui fasilitas persidangan yang ditempatkan di Perguruan Tinggi terdekat dari lokasi para pihak,
- Mendapatkan jaminan keamanan,
- Pelayanan juru sumpah dari MK,
- Hemat karena tidak perlu hadir di Gedung MK Jakarta,
- Menyampaikan alat bukti dengan format elektronik ataupun fisik,
- Dapat mendatangkan saksi/ahli yang lebih banyak.

Pengajuan Permohonan Persidangan Jarak Jauh

- Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait atau Kuasanya mengajukan permohonan ke MK (identitas pemohon yang hendak diperiksa/didengar keterangannya, pokok-pokok keterangan yang hendak diberikan, alokasi waktu pemeriksaan, tempat pelaksanaan dan petugas lain yang dibutuhkan),
- Diajukan kepada Ketua MK melalui kepaniteraan MK, 5 (lima) hari sebelum rencana Persidangan Jarak Jauh, diajukan langsung dalam Persidangan MK selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum rencana Persidangan Jarak Jauh,
- Jika disetujui, MK akan memberitahukan kepada Para Pihak untuk tempat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh.

VICON DI 42 FAKULTAS HUKUM PERGURUAN TINGGI



VICON DI 42 FAKULTAS HUKUM PERGURUAN TINGGI

1. Aceh
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
2. Bali
Fakultas Hukum Universitas Udayana
3. Bangka Belitung
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
4. Bengkulu
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
5. D.I. Yogyakarta
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
6. Gorontalo
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
7. Jambi
Fakultas Hukum Universitas Jambi
8. Jawa Barat
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
9. Banten
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
10. Jawa Tengah
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti

VICON DI 42 FAKULTAS HUKUM PERGURUAN TINGGI

- | | |
|-------------------------|---|
| 11. Jawa Timur | Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Fakultas Hukum Universitas Jember
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo |
| 12. Kalimantan Barat | Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura |
| 13. Kalimantan Selatan | Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat |
| 14. Kalimantan Tengah | Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya |
| 15. Kalimantan Timur | Fakultas Hukum Universitas Mulawarman |
| 16. Kalimantan Utara | Fakultas Hukum Universitas Borneo |
| 17. Kepulauan Riau | Fakultas Hukum Universitas Batam |
| 18. Lampung | Fakultas Hukum Universitas Lampung |
| 19. Maluku | Fakultas Hukum Universitas Patimura |
| 20. Maluku Utara | Fakultas Hukum Universitas Khairun |
| 21. Nusa Tenggara Barat | Fakultas Hukum Universitas Mataram |

VICON DI 42 FAKULTAS HUKUM PERGURUAN TINGGI

- | | |
|-------------------------|---|
| 22. Nusa Tenggara Timur | Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana |
| 23. Papua | Fakultas Hukum Universitas Musamus |
| 24. Papua Barat | Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
Universitas Negeri Papua |
| 25. Riau | Fakultas Hukum Universitas Riau |
| 26. Sulawesi Utara | Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi |
| 27. Sulawesi Barat | Universitas Al Asyariah Mandar |
| 28. Sulawesi Selatan | Fakultas Hukum Universitas Hasanudin |
| 29. Sulawesi Tengah | Fakultas Hukum Universitas Tadulako |
| 30. Sulawesi Tenggara | Fakultas Hukum Universitas Haluleo |
| 31. Sumatera Barat | Fakultas Hukum Universitas Andalas |
| 32. Sumatera Selatan | Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya |
| 33. Sumatera Utara | Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara |

LIVE STREAMING

Rabu, 04 April 2018

English Search 

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

[BERANDA](#) [PERADILAN](#) [HAKIM](#) [PERKARA](#) [PUTUSAN](#) [PERATURAN](#) [ADMINISTRASI UMUM](#) [PUBLIKASI](#) [WHISTLEBLOWING](#) 

VIDEO CONFERENCE

- [LIVE STREAMING](#)
- [JADWAL KULIAH UMUM](#)
- [JADWAL KUNJUNGAN MKRI](#)



[BERANDA](#) > [PRIMA/RUMAH ADMINISTRASI](#) >

LIVE STREAMING DAN VIDEO CONFERENCE

Tata Cara Pelayanan Persidangan Jarak Jauh Melalui Video Conferencing



[Kanal 1](#)

Ruang Sidang Pleno

[Kanal 2](#)

Ruang Sidang Panel 1

[Kanal 3](#)

Ruang Sidang Panel 2

[Kanal 4](#)

Kuliah Umum

TERIMA KASIH